

ABSTRAK

Asep Chodam Bastian, 12102183191, Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag., M.H.I

Kata Kunci: Pidana, Pemaksaan Perkawinan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kasus pemaksaan perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat menyebabkan adanya regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dikeluarkannya regulasi tersebut dikarenakan adanya keresahan yang timbul dalam masyarakat karena perkawinan paksa ini merupakan salah satu faktor besar terjadinya perceraian di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2) Bagaimana ketentuan pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pidana pemaksaan perkawinan (2) Menganalisis ketentuan pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang jenis penelitian hukum normatif (*normative legal reseach*) dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan bahan hukum berupa pemeriksaan bahan hukum, klarifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Hasil dari penelitian adalah: (1) Fenomena pemaksaan perkawinan kerap terjadi dalam masyarakat, sehingga pemerintah mengambil langkah strategis untuk melindungi dan memulihkan hak korban serta memberikan efek jera bagi pelaku melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengaatur kebijakan tersebut. Undang-Undang TPKS telah disusun sebaik mungkin dan disahkan guna memberikan keadilan bagi korban agar tetap dapat menjaga harkat dan martabat manusia. Perlindungan lain dalam bentuk penjara dan denda yang besar bagi para pelaku. (2) Dari kacamata *Maqāṣid al-Syarī'ah* tindakan pemaksaan perkawinan menggambarkan tidak terpenuhinya tujuan syariat dalam perkawinan terutama dari *masalah ḍaruriyat* yaitu memelihara jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), memelihara akal (*Hifẓ al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), memelihara kehormatan (*Hifẓ al-'Ird*). Maka dari itu, korban pemaksaan perkawinan butuh adanya perlindungan dan keadilan sehingga tidak terjadi kembali kekerasan seksual pada seorang istri.

ABSTRACT

Asep Chodam Bastian, 12102183191, Punishment of Forced Marriage According to Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence in the *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspective, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag., M.H.I.

Keywords: Punishment, Forced Marriage, Law on Sexual Violence, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Cases of forced marriage that often occur in society have led to new regulations being created by the government in the form of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The issuance of this regulation was due to unrest that arose in society because forced marriage was one of the big factors in the occurrence of divorce in Indonesia. Forced marriages in Indonesia are mostly caused by various family problem factors, such as nadzar, debt bondage, promises, rape, culture and other causes.

The formulation of the problem in this research is: (1) What are the provisions for punishing forced marriage in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence? (2) What are the provisions for punishing forced marriage in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence in *Maqāṣid al-Shari'ah* perspective. The objectives of this research are (1) To describe Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence which regulates the punishment of forced marriage (2) Analyze the provisions for the punishment of forced marriage in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Actions of Sexual Violence in Perspective *Maqāṣid al-Shari'ah*.

The method used in this study is a qualitative method which is a type of normative legal research (*normative legal reseach*) with the nature of analytical descriptive research. Legal material collection techniques are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal material processing techniques in the form of examination of legal materials, clarification, analysis, and conclusions.

The results of the research are: (1) The phenomenon of forced marriage often occurs in society, so the government takes strategic steps to protect and restore the rights of victims and provide a deterrent effect for perpetrators through Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence which regulates this policy. The TPKS Law has been drafted as best as possible and passed in order to provide justice for victims so that they can maintain human dignity. Other protections take the form of prison and large fines for perpetrators. (2) From the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, the act of forced marriage illustrates the failure to fulfill the objectives of the Shari'a in marriage, especially the *maslahah ḍaruriyat*, namely preserving the soul (*Hifẓ al-Nafs*), preserving the mind (*Hifẓ al-Aql*), preserving offspring (*Hifẓ al-Nasl*), maintaining honor (*Hifẓ al-'Ird*). Therefore, victims of forced marriage need protection and justice so that sexual violence does not happen again to a wife.

